



PUTUSAN
Nomor 1153/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-867/PJ/2017, tanggal 1 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PETROSEA-PT CLOUGH, beralamat di Taman Kemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, dan beralamat Korespondensi di Indy Bintaro Office Park – Building B, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, CBD Bintaro kav. B7/A6, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15220;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-78059/PP/M.VIII B/13/2016, tanggal 30 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding
2. Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1153/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/05/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Januari 2005 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00020/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhir dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00015/WPJ.04/KP.0707/ 2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama PT Petrosea - PT Clough,

Bahwa dengan demikian maka perhitungan pajak yang benar menurut Pemohon Banding seharusnya sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
	Pemohon Banding	Terbanding
Dasar Pengenaan Pajak	202.756.910,00	381.225.524,00
PPH Pasal 26 yang terutang	28.418.948,00	73.998.075,00
Kredit Pajak	28.418.948,00	16.345.689,00
PPH yang kurang/ tidak dipotong	0,00	57.652.386,00
Sanksi Administrasi	0,00	27.673.145,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00	85.325.531,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-78059/PP/M.VIIIB/13/2016, tanggal 30 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/05/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Januari 2005 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00020/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhir dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00015/WPJ.04/KP.0707/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama PT Petrosea - PT Clough, NPWP: 02.161.153.8-014.000, beralamat Keputusan di Taman Kemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp 202.756.910

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1153/B/PK/Pjk/2021



Pajak Penghasilan Terutang	Rp	28.418.948
Kredit Pajak	Rp	16.345.689
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	Rp	-
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	12.073.259
Sanksi Administrasi	Rp	5.795.164
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	17.868.423

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Maret 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78059/PP/M.VIIIB/13/2016 tanggal 30 November 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78059/PP/M.VIIIB/13/2016 tanggal 30 November 2016 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;

3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/05/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Januari 2005 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00020/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhir dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00015/WPJ.04/KP.0707/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama PT Petrosea - PT Clough, NPWP : 02.161.153.8-014.000, beralamat di Taman Kemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-75/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/05/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Januari 2005 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00020/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhir dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00015/WPJ.04/KP.0707/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.161.153.8-014.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp17.868.423,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak



memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* atas penyerahan Jasa LN berupa *Commence hire of Load Link for Rental* dan *Bow Bolt & Nut Shackle For Rental* dari Gaylin International Pte Ltd maka berdasarkan bukti pendukung berupa invoice terkait pembayaran Jasa LN tersebut bahwa Majelis Hakim Agung sependapat dengan baik dengan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Pajak bahwa pembayaran Jasa Luar Negeri berupa *Commence hire of Load Link* tersebut termasuk dalam kategori Royalty, sehingga berdasarkan *treaty* mendapat fasilitas atas perlakuan perpajakan dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 26 dan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *Juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *Article* 27, 31 *Vienna Convention Juncto* Pasal 12 P3B Indonesia-Singapore;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp17.868.423,00; dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1153/B/PK/Pjk/2021



Dasar Pengenaan Pajak	Rp	202.756.910
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	28.418.948
Kredit Pajak	Rp	16.345.689
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	Rp	-
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	12.073.259
Sanksi Administrasi	Rp	5.795.164
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	17.868.423

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1153/B/PK/Pjk/2021